

**PERANAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS KENTANG**

*(Studi Kasus Dalam Kajian Agribisnis di Kelurahan
Pattapang, Kecamatan Tiggimoncong, Kabupaten
Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan)*

Oleh:

FATMAWATI MASKUR

G 211 09 275



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**“PERANAN KELEMBAGAAN DALAM
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KENTANG”**

*(Studi Kasus Dalam Kajian Agribisnis di Kelurahan Pattapang,
Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi
Sulawesi Selatan)*

Oleh :

**FATMAWATI MASKUR
G 211 09 275**

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian

Pada

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar
2013

Disetujui oleh,

Ir. A. Amrullah Majjika, M.Si.
Dosen Pembimbing

Ir. Idris Summase, M.Si
Dosen Pembimbing

Mengetahui :

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S.
NIP 19610829 198601 2 001

ABSTRAK

Fatmawati Maskur, G211 09 275. Peranan Kelembagaan Dalam Pengembangan Agribisnis Kentang(Studi Kasus Dalam Kajian Agribisnis di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan), di bawah bimbingan **A. Amrullah Majjika** dan **Idris Summase**.

Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui lembaga yang terlibat dalam pengembangan agribisnis tanaman kentang. 2) Mengetahui bagaimana peranan kelembagaan dalam pengembangan agribisnis tanaman kentang. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dilaksanakan selama 2 bulan mulai bulan Februari hingga April 2013. Penentuan sampel petani dilakukan dengan metode *Simple Random Sampling*. Di mana jumlah populasi petani kentang yaitu 375 orang dari 15 kelompok tani, maka jumlah responden petani adalah sebanyak 30 orang serta semua kelembagaan yang ada di daerah penelitian. Metode analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, mengkaji secara mendalam bagaimana peranan kelembagaan yang ada dan tersedia dapat mendukung pengembangan agribisnis tanaman kentang di kabupaten gowa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Lembaga yang berperan penting dalam pengembangan agribisnis tanaman kentang yaitu Kelembagaan Kelompok tani, Kelembagaan Pemerintah antara lain Dinas Pertanian Gowa, Balai Penyuluhan Pertanian, Balai Benih/Induk, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Kelembagaan swasta yaitu Divisi Bioteknologi Universitas Hasanuddin, PT. Labiota Indah dan Penangkar benih. Kelembagaan LSM yaitu P4S. (2) Peranan kelembagaan dalam pengembangan agribisnis tanaman kentang yaitu, Kelembagaan petani dalam hal ini Kelompok tani dan kelembagaan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pengembangan agribisnis pada subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem pasca panen dan pengolahan hasil, serta subsistem pemasaran. Kelembagaan swasta dalam hal ini Divisi Bioteknologi Universitas Hasanuddin, PT. Labiota Indah dan Penangkar Benih berpengaruh terhadap pengembangan agribisnis pada subsistem sarana produksi untuk menyediakan bibit. Kelembagaan swadaya dalam hal ini Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) berpengaruh terhadap pengembangan agribisnis dalam penyediaan mesin pertanian, memberikan pelatihan atau penyuluhan, serta informasi tentang harga pasar.

Kata kunci : Petani Kentang, Kelembagaan, Pengembangan Agribisnis

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Fatmawati Maskur, lahir di Rantepao pada tanggal 21 September 1991. Merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Maskur Kurani dan Dubiyanti.

Pendidikan formal yang telah dilalui penulis adalah Taman Kanak-Kanak Islam Rantepao tahun 1995. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Madrasah Ibtidayyah Rantepao pada tahun 1997–2003. Lalu kembali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rantepao pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, melalui jalur SPMB penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

Sebagai seorang mahasiswa, penulis aktif berorganisasi yaitu sebagai Badan Pengurus Harian Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (MISEKTA) periode 2011/2012. Penulis juga aktif dalam kepanitiaan yang diadakan oleh MISEKTA, pihak Jurusan, dan pihak Fakultas, serta aktif mengikuti berbagai seminar yang dilaksanakan tingkat lokal maupun nasional.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, kedamaian dan kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah bagi Rasulullah saw, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, sebagai pembawa risalah kebenaran dari alam yang gelap gulita menuju cahaya Ilahia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peranan Kelembagaan Dalam Pengembangan Agribisnis Kentang**”(Studi Kasus Dalam Kajian Agribisnis di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan) atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya memberikan kekuatan dan kemudahan jalan bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tiada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Untuk keterbatasan, kekhilafan, ketidaksempurnaan penulis sebagai seorang anak manusia yang hanya memiliki mimpi dan cita-cita. Namun dalam setiap gerak, senantiasa menuju cahaya kesempurnaan mengejar ridho-Nya.

Maka penulis sangat mengharapkan saran yang konstruktif dari para pembaca dan semua pihak yang terkait untuk penyempurnaan karya tulis ini, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran kepada penulis.

Akhir kata, semoga percikan pemikiran yang tersaji dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga jasa baik dan amal bakti kita tercatat sebagai pahala di sisi-Nya. Amin.

Makassar, Agustus 2013

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, satu dari berbagai nikmat yang selalu diberikan Allah SWT kepada setiap hambaNya, yakni terselesaikannya tugas akhir penulis dalam meraih gelar Sarjana Pertanian di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir jaman.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, Moril maupun Materiil, dan perkenankan penulis menghatur penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya teristimewa, teriring doa dan kasih sayang yang tiada henti atas segala cinta dan sayang yang tiada berujung, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis, Ayahanda **Maskur Kurani** dan Ibunda **Dubiyanti** serta kakak **Rudi Maskur**, **NenoNovianti**, **Handayani** serta adik **Rahma Sarita**. Terima kasih sepanjang masa untuk keenam Hamba Allah ini. Semoga sedikit buah karya ini bisa melahirkan seulas senyum bangga dari hati kalian, semoga

Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keenamnya.

Penulis juga sangat berterima kasih tak terhingga kepada Kakanda **Masrur M. Wais, S.P**, yang tetap setia mendampingi penulis dalam melewati hari-harinya, yang bersedia menjadi teman bertukar pikiran dalam skripsi ini, yang terus menjadi motivator pribadi. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat penulis tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. *Thank you for everything.*

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. dengan tidak mengurangi rasa simpati dan hormat kepada mereka yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini. Olehnya itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS.** selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang telah banyak memberikan pengetahuan, mengayomi dan memberikan teladan selama penulis menempuh pendidikan.
2. **Ir. A.Amrullah Majjika, M.Si.** selaku Pembimbing Isekaligus selaku penasehat akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta teguran membangun sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih pak, atas setiap waktu bimbingan yang selalu memberikan penulis ilmu dan pemahaman baru mengenai berbagai hal.

3. **Ir. Idris Summase, M.Si** selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. **Prof. Dr. Ir. Rahim Darma, M.S** dan **Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si.** selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan tugas akhir ini. Walaupun beliau bukanlah pembimbing skripsi penulis, namun beliau masih rela untuk meluangkan waktunya dan selalu memperhatikan perkembangan skripsi penulis.
5. **Rusli. Moh. Rukka, SP. M.Si** selaku panitia ujian sarjanad an **Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si.** selaku panitia seminar yang telah memberikan petunjuk dalam setiap pelaksanaan seminar dan ujian demi terselesaikannya tugas akhir ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen, khususnya Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,** yang membimbing penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Hasanuddin sampai penulis merampungkan tugas akhir ini.
7. Seluruh Staf dan Pegawai Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Khususnya **Pak Yusuf, Pak Bahar, Ka' Hera,** dan **Ka'Ardi** yang telah membantu penulis dalam proses administrasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Gadis-gadisku **Sartika, Trisna Rezky F., Sri Reski Yanti, St. Agrina Hadiana, Irda Yusnidar, Resky Aulia Idham, Reski Firta Yanti, Mirna Syahrudin, Dita Sasmita, Dyah Rahayu, Sri Reski E.**

Rosmala. Di kampus inilah kita saling mengenal, melalui banyak hal dalam suka dan duka. Di kampus inilah kita telah mengukir cerita tentang kita, tentang semangat kita, tentang air mata kita, dan tentang impian kita. Terima kasih untuk semua canda tawa, gosip, jalan-jalan, kerja sama, dan dukungan yang saling kita berikan satu sama lain dalam proses pembuatan skripsi ini.

9. Sahabat seperjuanganku "**MIZONE**" **Mutia, Kety, Arie, Dinha, Atirah, Ridha, Laily, Tata, Aby, Audyah, Bundo, Noe, Iis, Anti, Kumala, Sylvia, Uci, Diny, Amma, Dillah, Dian, K'Elia, Fanny, Lia, Kadek, Jemy, Amrul, Ade, Andi, Wawan, Fuad, Suko, Rifky, Akbar, Rusli, Eko, Agus, Iccank, Rion.** Terima kasih telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, serta atas segala bantuan, saran, motivasi kepada penulis mulai dari pertama menginjakkan kaki di kampus bersama-sama hingga sampai pada saat ini.
10. **Shuwandi A. Padang,** yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, segala bantuan, saran, motivasi kepada penulis.
11. **Keluarga Besar Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (MISEKTA),** yang sangat berperan dalam pembentukan kepribadian dan karakter penulis. **MISEKTA-ku,** wadah komunikasi-ku, curahan bakat minat-ku dan Insya Allah menjadi tuntunan masa depanku.
12. Teman-teman **KKN Gel. 82 Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang,** Winda, Desar, Asdan, Haidir, Saleh, Hendrik, dan Amri yang telah memberikan naungan terindah selama penulis melaksanakan KKN.

13. Serta seluruh anggota keluarga besar yang penulis sayangi yang selalu member semangat dan doa-doanya kepada penulis.

Demikianlah semoga segala pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis diberikan kebahagiaan dan rahmat oleh Allah SWT, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Agustus 2013

Fatmawati Maskur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan	9
II.TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kelembagaan	11
2.2 Agribisnis Kentang	16
2.3 Kelembagaan dalam Agribisnis Kentang.....	20
2.4 Pengembangan Kelembagaan dalam Agribisnis Kentang	25
2.5 Kerangka Pikir.....	31
III.METODE PENELITIAN	34
3.1 Metode Penentuan Daerah.....	34

3.2 Metode Pengambilan Sampel	34
3.3 Metode Pengambilan Data.....	35
3.4 Jenis Data dan Metode Analisa Data	35
3.5 Konsep Operasional.....	36
IV.KEADAAN UMUM LOKASI.....	38
4.1. Batas Wilayah dan Topografi.....	38
4.2. Keadaan Iklim.....	39
4.3. Pola Penggunaan Lahan	40
4.4. Keadaan Penduduk	41
4.4.1. Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin.	42
4.4.2.Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	43
4.4.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian	44
4.5. Sarana dan Prasarana.....	45
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Karakteristik Responden.....	47
5.1.1. Umur Petani	47
5.1.2. Pendidikan	49
5.1.3. Pengalaman Berusaha Tani.....	51
5.1.4. Jumlah Anggota Keluarga	53
5.1.5. Luas Lahan Yang Dimiliki.....	54
5.1.6. Komoditas Yang Diusahakan	56
5.2Profil Usahatani Kentang	58
5.2.1. Luas Usahatani Kentang.....	58
5.2.2. Cara Pengolahan Dan Penyiapan Lahan	59
5.2.3. Jenis Benih Dan Teknik Penanaman	60
5.2.4. Jenis Pupuk dan Frekuensi Pemupukan	61
5.2.5. Pengendalian Gulma dan Hama Penyait	63

5.2.6. Penggunaan Tenaga Kerja	65
5.2.7. Produksi dan Nilai Produktivitas.....	66
5.3 Lembaga yang Berperan Penting Dalam Pengembangan Agribisnis Tanaman Kentang.....	67
5.3.1. Kelembagaan Petani.....	67
5.3.2. Kelembagaan Pemerintah.....	69
5.3.3. Kelembagaan Swasta	71
5.3.4. Kelembagaan Swadaya	75
5.4 Peranan Kelembagaan Dalam Pengembangan Agribisnis Tanaman Kentang.....	76
5.4.1. Subsistem Sarana Produksi.....	76
5.4.2. Subsistem Budidaya.....	78
5.4.3. Subsistem Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil.....	81
5.4.4. Subsistem Pemasaran	83
5.5 Perkembangan Sosiologi (Interaksi AntarKelembagaan)	86
5.6 Permasalahan dalam Kelembagaan Agribisnis	88
VI. PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	TEKS	Halaman
1	Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	42
2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	43
3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	45
4	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	46
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	48
6	Distribusi Petani Kentang Menurut Umurnya di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	51
7	Distribusi Petani Kentang Menurut Pendidikan Formalnya di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	53
8	Distribusi Petani Menurut Pengalaman Berusahatani Kentang di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013.	55
9	Distribusi Petani Responden Menurut Jumlah Anggota Keluarganya Di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013.	57
10	Distribusi Petani Responden Menurut Luas Lahan yang dimiliki di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	59

11	Distribusi Petani Menurut Jenis Komoditas yang diusahakan di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	60
12	Distribusi Usahatani Kentang Menurut Luasnya di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	62
13	Jumlah Rata-Rata Pupuk Yang Digunakan Dalam Usahatani Kentang Di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013.	67
14	Rata-Rata Penggunaan Pestisida, Fungisida dan Herbisida Pada Usahatani Kentang di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013.	69
15	Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usahatani Kentang di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	70
16	Distribusi Usahatani Kentang Menurut Produktivitasnya di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	72
17	Lembaga Pemerintah Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	74
18	Subsistem Sarana Produksi Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	79
19	Subsistem Budidaya Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	82
20	Subsistem Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	84
21	Subsistem Pemasaran Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 2013	87

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
	Gambar 1. KerangkaPikir.....	33
	Gambar 2. TahapanPenangananPascaPanen	82
	Gambar 3. InteraksiAntarKelembagaan.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks
Lampiran 1.	Peta Lokasi Penelitian.
Lampiran 2.	Identitas Petani Responden di Kelurahan Pattapang
Lampiran 3.	Nama-namaKelompokTani di Kelurahan Pattapang
Lampiran 4.	Foto-Foto Penelitian.
Lampiran 5.	Matriks Penelitian

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau produk nasional yang berasal dari pertanian. Sektor pertanian masih tetap merupakan tulang punggung perekonomian bagi kebanyakan negara yang sedang berkembang. Secara khusus sektor pertanian merupakan sumber lapangan kerja tersebar, sehingga dalam pembangunan di Indonesia sektor pertanian mendapat prioritas utama dalam program pembangunan. Hal ini disebabkan penduduk yang mata pencahariannya masih tergantung pada sektor pertanian jumlahnya cukup besar (Mubyarto, 1989).

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia, bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Pembangunan pertanian telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Lembaga merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau, secara formal dapat dikatakan sebagai sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

Dilihat dari berbagai aspek, seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan nasional, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk agribisnis, dan peta kompetisi dunia, Indonesia memiliki prospek untuk mengembangkan sistem agribisnis. Prospek ini secara aktual dan faktual ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sistem agribisnis di Indonesia telah menjadi keputusan politik. Rakyat melalui MPR telah memberi arah pembangunan ekonomi sebagaimana dimuat dalam GBHN 1999-2004 yang antara lain mengamanatkan pembangunan keunggulan komparatif Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Arah GBHN tersebut tidak lain adalah pembangunan sistem agribisnis.

Kedua, pembangunan sistem agribisnis juga searah dengan amanat konstitusi yakni No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999 dan PP 25 tahun 2000 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah. Dari segi ekonomi, esensi Otonomi Daerah adalah mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan mendayagunakan sumberdaya yang tersedia di setiap daerah, yang tidak lain adalah sumberdaya di bidang agribisnis. Selain itu, pada saat ini hampir seluruh daerah struktur perekonomiannya (pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, ekspor) sebagian besar (sekitar 80 persen) disumbang oleh agribisnis. Karena itu, pembangunan sistem agribisnis identik dengan pembangunan ekonomi daerah.

Ketiga, Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dalam agribisnis. Kita memiliki kekayaan keragaman hayati (*biodiversity*) daratan dan perairan yang terbesar di dunia, lahan yang relatif luas dan subur, dan agroklimat yang bersahabat untuk agribisnis. Dari kekayaan sumberdaya yang kita miliki hampir tak terbatas produk-produk agribisnis yang dapat dihasilkan dari bumi Indonesia. Selain itu, Indonesia saat ini memiliki sumberdaya manusia (SDM) agribisnis, modal sosial (kelembagaan petani, *local wisdom*, *indigenous technologies*) yang kuat dan infrastruktur agribisnis yang relatif lengkap untuk membangun sistem agribisnis.

Keempat, pembangunan sistem agribisnis yang berbasis pada sumberdaya domestik (*domestic resources based, high local content*) tidak memerlukan impor dan pembiayaan eksternal (utang luar negeri) yang besar. Hal ini sesuai dengan tuntutan pembangunan ke depan yang menghendaki tidak lagi menambah utang luar negeri karena utang luar negeri Indonesia yang sudah terlalu besar.

Kelima, dalam menghadapi persaingan ekonomi global, Indonesia tidak mungkin mampu bersaing pada produk-produk yang sudah dikuasai negara maju. Indonesia tidak mampu bersaing dalam industri otomotif, eletronika, dll dengan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman atau Perancis. Karena itu, Indonesia harus memilih produk-produk yang memungkinkan Indonesia memiliki keunggulan bersaing di mana negara-negara maju kurang memiliki keunggulan pada produk-produk yang bersangkutan. Produk yang mungkin Indonesia memiliki keunggulan bersaing adalah produk-produk agribisnis, seperti barangbarang dari karet, produk turunan CPO (detergen, sabun, palmoil, dll). Biarlah Jepang menghasilkan mobil, tetapi Indonesia menghasilkan ban-nya, bahan bakar (*palmoil diese*), *palmoil-lubricant*.

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial

yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Kelembagaan petani juga memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan (Suradisastra, 2008).

Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia terutama terlihat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan, khususnya padi. Di tingkat makro nasional, peran lembaga pembangunan pertanian sangat menonjol dalam program dan proyek intensifikasi dan peningkatan produksi pangan. Kegiatan pembangunan pertanian dituangkan dalam bentuk program dan proyek dengan membangun kelembagaan koersif (kelembagaan yang dipaksakan), seperti Padi Sentra, Demonstrasi Massal (Demas), Bimbingan Massal (Bimas), Bimas Gotong Royong, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), Insus, dan Supra Insus. Pada subsector peternakan dikembangkan berbagai program dan lembaga pembangunan koersif, seperti Bimas Ayam Ras, Intensifikasi Ayam Buras (Intab), Intensifikasi Ternak Kerbau (Intek), dan berbagai program serta kelembagaan intensifikasi lainnya. Kondisi di atas menunjukkan signifikansi keberdayaan kelembagaan dalam akselerasi pembangunan sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan hasil berbagai pengamatan yang

menyimpulkan bahwa bila inisiatif pembangunan pertanian dilaksanakan oleh suatu kelembagaan atau organisasi, di mana individu-individu yang memiliki jiwa berorganisasi menggabungkan pengetahuannya dalam tahap perencanaan dan implementasi inisiatif tersebut maka peluang keberhasilan pembangunan pertanian menjadi semakin besar (De los Reyes dan Jopillo 1986; USAID 1987; Kottak 1991; Uphoff 1992a; Cernea 1993; Bunch dan Lopez 1994 dalam Sradisastra, 2011).

Menurut Dimiyati (2007), permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah: (1) Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran; (2) Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm) ; (3) Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi bargaining position petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan

menguntungkan petani. Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan.

Tanaman kentang (*Solanum tuberosum* L.) di Indonesia merupakan salah satu komoditas yang mendapat prioritas pengembangan, karena dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat, bernutrisi tinggi terutama vitamin dan mineral, dan mempunyai potensi dalam diversifikasi pangan. Permintaan pasar terhadap kentang dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung meningkat sejalan dengan berkembangnya jumlah penduduk yang menggunakan kentang sebagai sayuran sehari-hari, meningkatnya pendapatan, berkembangnya industri pengolahan makanan. Keadaan tersebut mengakibatkan bertambah luasnya pertanaman kentang dan meningkatnya permintaan benih kentang bermutu/berkualitas (Karjadi, 2002).

Di Indonesia kentang ditanam di dataran tinggi seluas 39.835 ha/tahun dengan hasil rata-rata yang masih rendah yakni 13 t/ha. Pada tahun 1998 luas areal pertanaman kentang mencapai 65.047,46 ha dengan hasil rata-rata 14,50 t/ha. Hasil yang dicapai ini masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara produsen kentang atau potensi hasil yang dapat dicapai oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) Lembang. Hasil yang dicapai oleh Balitsa adalah 35t/ha. Salah satu

kendala dalam meningkatkan produksi adalah pengadaan dan distribusi benih berkualitas yang belum memadai, sehingga petani menggunakan benih yang bermutu rendah (Karjadi, 2002).

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi lahan yang cukup luas dan subur untuk pengembangan berbagai macam komoditi dan salah satunya yang cukup berhasil adalah komoditi kentang. Kelurahan Pattapang merupakan sentra produksi kentang di Kabupaten Gowa, walaupun belum mampu memenuhi kebutuhan nasional akan kentang, namun produksi kentang petani kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong telah mendukung penyediaan kebutuhan kentang, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut maka ingin dilakukan penelitian mengenai **“Peranan Kelembagaan Dalam Pengembangan Agribisnis Kentang (Studi Kasus dalam Kajian Agribisnis di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang muncul sehubungan dengan latar belakang adalah :

1. Lembaga apa saja yang berperan penting dalam pengembangan agribisnis tanaman kentang di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana peranan kelembagaan dalam pengembangan agribisnis tanaman kentang di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

1. Mengetahui lembaga yang terlibat dalam pengembangan agribisnis tanaman kentang.
2. Mengetahui bagaimana peranan kelembagaan dalam pengembangan agribisnis tanaman kentang.

1.3.2 Kegunaan

1. Bagi petani di daerah penelitian, informasi ini dapat berguna dalam pengambilan langkah-langkah yang tepat bagi pengembangan usahatani kentang, yang dapat meningkatkan produksinya.
2. Bagi penulis penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, pembandingan dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
4. Sebagai tugas akhir yang merupakan prasyarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelembagaan

Lembaga adalah sistem hubungan social yang terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Dalam definisi ini nilai-nilai umum mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama , prosedur umum adalah pola-pola perilaku yang dibakukan dan di ikuti dan sistem hubungan adalah jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku tersebut (Hill,1999).

Lembaga muncul sebagai produk kehidupan social yang sungguh tidak direncanakan. Orang mencari-cari cara yang praktis untuk memenuhi kebutuhannya,mereka menemukan beberapa pola yang dapat dilaksanakan yang menjadi kebiasaan yang baku karena terus menerus diulangi. Dari waktu ke waktu orang mungkin bergabung untuk mengkodifikasikan dan melegalisasikan praktek-praktek tersebut karena terus berkembang dan berubah .Dengan cara itulah lembaga tumbuh (Hill,1999).

Kelembagaan terdiri dari penetapan norma-norma yang pasti yang menentukan posisi status dan fungsi peranan untuk perilaku. Kelembagaan mencakup penggantian perilaku spontan atau eksperimental dengan perilaku yang diharapkan,dipolakan,teratur dan dapat diramalkan. Seperangkat hubungan sosial akan melembaga apabila

sudah dikembangkan suatu sistem yang teratur tentang status dan peran serta sistem harapan status dan peran sudah umum diterima oleh masyarakat. Di dalam kelembagaan terjadi suatu hubungan timbal balik seperti halnya pada kelembagaan pendukung dalam pengembangan agribisnis dan hortikultura (Hill,1999).

Kelembagaan adalah sosial form ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Kata “kelembagaan” menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup (constitued) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan social (Koentjaraningrat, 1997).

Setelah mengetahui pengertian tentang apa itu kelembagaan, sebenarnya ada tiga hal penting terkait kelembagaan yang perlu di garis bawahi, yakni **sistem sosial masyarakat, efisien dan memiliki tujuan**. Berbicara kelembagaan khususnya di bidang pertanian, sangat lekat dengan sistem agribisnis. Suatu sistem yang apabila berjalan dengan baik, maka akan menciptakan kondisi yang baik. Kelembagaan termasuk di dalam sistem agribisnis yang diharapkan dapat bekerja dengan baik didalam sistem social masyakat, efisien dan memiliki tujuan

yang mendorong kemajuan masyarakat. Namun, proses yang melibatkan kelembagaan, baik dalam bentuk lembaga organisasi maupun kelembagaan norma dan tata pengaturan, pada umumnya masih terpusat pada proses pengumpulan dan pemasaran dalam skala tertentu. Kelembagaan pertanian dan petani belum terlihat perannya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Padahal fungsi kelembagaan agribisnis sangat beragam, antara lain adalah sebagai penggerak, penghimpun, penyalur sarana produksi, pembangkit minat dan sikap, dan lain-lain (Anonim, 2011).

Adapun macam-macam kelembagaan yaitu :

1. Kelembagaan petani, berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi.
2. Kelembagaan pemerintah, berbentuk kelembagaan penyuluhan baik di tingkat nasional, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
3. Kelembagaan swasta, bergerak di bidang pengadaan sarana produksi, keuangan dan pengangkutan.
4. Kelembagaan LSM (lembaga Swadaya Masyarakat), bergerak di bidang pengujian dan penyuluhan.

Adanya beberapa kelembagaan yang berkembang, perlu dikembangkan kemitraan antar instansi pemerintah dan masyarakat, yaitu dengan melakukan perjanjian/kontrak kerjasama antara lembaga publik dan sektor swasta yang memungkinkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya kemitraan ini, akan terjadi kerjasama dan pembagian peran dan

tanggung jawab bersama, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun pembagian resiko serta akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan.

Manfaat adanya Kemitraan yaitu ;(1) Pengembangan metode perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proyek-proyek pembangunan. ;(2) Penghematan biaya proyek. ;(3) Perbaikan mutu kinerja, pemanfaatan inovasi dan perbaikan teknis dan manajemen. ;(4) Pemanfaatan sumberdaya personal dan swasta untuk mengatasi kendala yang dihadapi sumberdaya publik. ;(5) Tumbuh dan berkembangnya akses terhadap sumberdaya baru yang dimiliki swasta.

Kemitraan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yaitu: (1) Konseptualisasi dan keaslian proyek ; (2) Perancangan ; (3) Perencanaan finansial dan pembiayaan ; (4) Konstruksi ; (5) Operasional ; (6) Pemeliharaan ; (7) Pungutan ; (8) Pengelolaan program.

Menurut Mosher, di setiap lokalitas usahatani diperlukan beberapa kelembagaan pertanian, yaitu : kelembagaan pemasaran, kelembagaan penelitian dan pengujian, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan penyedia sarana produksi, kelembagaan keuangan (penyedia kredit produksi), kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan kelembagaan transportasi.

Kelembagaan di tingkat lokal tersebut harus mempunyai akses dengan kelembagaan serupa di tingkat regional dan nasional.

1. Kelembagaan Penelitian dan Pengujian

Ditingkat lokal, kelembagaan ini dikenal sebagai petak pengujian lokal yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyuluh, petani maju dan atau pegiat lembaga swadaya masyarakat. Fungsi kelembagaan ini antara lain melakukan pengujian tentang : 1) efektivitas sarana produksi; 2) alternatif teknik budidaya tanaman ; 3) efektivitas peralatan/mesin pertanian.

2. Kelembagaan Penyuluhan

Sampai dengan tahun 1970-an, hanya dilakukan instansi pemerintah sejak dilaksanakan proyek penyuluhan tanaman pangan pada 1976, dikembangkan balai penyuluhan pertanian di tingkat wilayah pembantu bupati. Pada periode 1995-2000, ditingkat kabupaten pernah dicoba pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian yang terpisah dari dinas pertanian, yaitu balai informasi dan penyuluhan pertanian (BIPP) dengan kebijakan revitalisasi pertanian, diundangkan UU No. 16 Tahun 2007 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

3. Kelembagaan penyedia sarana produksi

Ditingkat nasional dan provinsi, kabupaten dan kecamatan ditangani oleh BUMN dan swasta (produser, distributor, penyalur) sedang ditingkat desa/kelurahan ditangani swasta (pengecer) dan KUD.

4. Kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil : BUMN (Bulog), swasta dan koperasi.
5. Kelembagaan keuangan : BRI dan swasta (pedagang, tengkulak, pelepas uang)
6. Kelembagaan pengangkutan (transportasi) : masih ditangani oleh swasta

2.2. Agribisnis Kentang

Menurut Downey dan Erickson (1991), agribisnis adalah keseluruhan dari kegiatan di bidang pertanian yang mencakup pengadaan input usahatani, kegiatan produksi usahatani, kegiatan pengolahan hasil pertanian dan kegiatan pemasaran hasil pertanian. Selain dari itu terdapat sub sistem penunjang yaitu lembaga-lembaga yang mendukung lancarnya kegiatan pada keempat sub sistem agribisnis misalnya lembaga keuangan dan lembaga penelitian dan lembaga penyuluhan. Di dalam proses pembangunan pertanian, agribisnis merupakan cara pandang baru dalam melihat kegiatan pertanian sebagai suatu unit bisnis dimana ada input, ada proses produksi dan ada output. Jika ketiga aspek ini dikelola sedemikian rupa maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi pengelolanya.

Menurut Saragih (1997), di dalam pendekatan agribisnis, usahatani tidak hanya berorientasi pada produksi yang tinggi, tetapi yang lebih utama adalah berorientasi komersil sehingga yang paling mendapat perhatian adalah efisiensi dari penggunaan faktor-faktor produksi.

Agribisnis juga tidak hanya memperhatikan sisi penawaran (*supply side*) yakni memasok hasil produksi sebanyak-banyaknya ke pasar tetapi juga harus memperhatikan sisi permintaan (*demand side*) yakni jenis, bentuk produk yang diinginkan oleh konsumen, serta harga yang berlaku di pasar. Dalam hal ini, pengembangan usahatani dari prespektif agribisnis memandang bahwa tidak hanya bercocok tanam atau berkebun saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga bagaimana menyediakan sarana produksinya, bagaimana proses produksi yang dilakukan, bagaimana mengolah dan memasarkan produk yang dihasilkan, serta bagaimana keterlibatan lembaga penunjang seperti perbankan untuk membantu membiayai usahatani yang dikelola. Selain itu, untuk memperkuat posisi tawar petani, diperlukan suatu kelembagaan kelompok tani serta koperasi yang dapat memasok kebutuhan input sekaligus menampung dan memasarkan hasil usahatani dari para petani anggotanya.

Selanjutnya Saragih (1997) menyatakan bahwa sistem agribisnis mencakup empat sub sistem inti yaitu: (1) Industri hulu pertanian atau disebut juga agribisnis hulu yaitu industri-industri yang menghasilkan peralatan dan sarana produksi (*input*) pertanian seperti industri yang menghasilkan mesin dan alat-alat pertanian, industri agrokimia (pupuk, pestisida, industri obat-obatan), (2) usahatani atau perkebunan dimana terjadi proses produksi secara biologis dibawah kendali seorang petani atau seorang pengusaha bersama para pegawai perkebunan. Sub sistem ini disebut juga *on farm* agribisnis, (3) Industri-industri yang kegiatannya

adalah mengolah hasil pertanian menjadi produk olahan baik produk antara maupun produk akhir. (4) Perusahaan-perusahaan pemasaran (*agricultural marketing*) yaitu lembaga-lembaga yang memasarkan produk-produk pertanian primer baik ke pasar lokal maupun ke industri-industri atau ke pasar luar negeri (ekspor).

Faktor yang mendorong para petani untuk terus meningkatkan aktivitas agribisnis sekurang-kurangnya ada dua yaitu; (1) dalam sistem agribisnis terdapat nilai tambah (*added value*) dimana yang terbesar berada pada sistem agribisnis hulu dan hilir, sedangkan subsistem usahatani sangat rendah sehingga selalu menerima pendapatan yang rendah, dan (2) Struktur produk agribisnis merupakan pasar persaingan sempurna sehingga para petani harus mampu memproduksi pada kondisi efisiensi tinggi agar dapat bersaing dengan produsen lain dalam pasar (Saragih, 2001). Apabila petani dapat memproduksi pada kondisi efisiensi tinggi kemudian dilanjutkan dengan pengolahan dan pemasaran untuk memperoleh nilai tambah, maka pendapatan para petani dari usahatannya akan meningkat.

Selama ini para petani hanya melaksanakan salah satu sub sistem agribisnis yaitu sub sistem produksi pada tingkat usahatani (*on farm*), sehingga pendapatan yang diperoleh selalu rendah. Itu sebabnya dalam pendekatan agribisnis, para petani diajarkan untuk melakukan integrasi kegiatan usahatannya mulai dari sub sistem pengadaan input dan sub sistem produksi sampai kepada sub sistem pengolahan dan pemasaran

hasil. Akan tetapi salah satu kesulitan petani untuk melakukan agribisnis secara terintegrasi adalah karena kurangnya modal serta belum dikuasainya teknologi pengolahan hasil pertanian yang sesuai dengan permintaan pasar. Selain dari itu skala usaha yang dikelola oleh para petani umumnya kecil sehingga tidak ekonomis untuk melakukan pengolahan secara sendiri-sendiri. Sehubungan dengan keterbatasan petani seperti itu maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak petani untuk membentuk kelompok tani dan koperasi para petani. Dengan demikian mereka dapat mendatangkan sarana produksi secara berkelompok dan juga mengolah atau memasarkan hasil produksinya secara bersama-sama. Hal ini selain memberikan keuntungan dalam bentuk penurunan biaya pengadaan input, juga mencegah para petani dari permainan harga oleh para pedagang hasil pertanian. (Soekartawi, 2002).

Faktor-faktor yang penting dan harus diputuskan dalam perencanaan agribisnis pada sub sistem produksi primer adalah pemilihan komoditas, pemilihan lokasi produksi, skala usaha dan perencanaan proses produksi. Dalam pemilihan komoditas harus ditetapkan jenisnya (varietasnya) dan harus sesuai dengan kondisi alam lokasi yang direncanakan. Pada agribisnis skala besar, pemilihan lokasi mempunyai pengaruh yang besar bagi keberhasilan dan kesinambungan usaha tersebut. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi yaitu (1) Ketersediaan tenaga kerja, prasarana dan sarana-sarana

fisik penunjang; (2) lokasi pemasaran; dan (3) ketersediaan insentif wilayah (Sa'id dan Intan, 2001).

Keputusan untuk mendirikan suatu usaha adalah karena adanya permintaan terhadap produk tertentu. Permintaan yang cukup besar dan didukung oleh daya beli yang memadai, cepat atau lambat akan menarik perhatian usahawan. Oleh karena permintaan ini maka menimbulkan suatu pasar. Luasnya pasar akan menimbulkan skala produksi yang akan diusahakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Rencana pembukaan usaha baru memerlukan perencanaan pengadaan fasilitas, dilanjutkan dengan rencana untuk proses produksi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses produksi adalah biaya produksi, penjualan produksi serta sumber-sumber input dan proses pengadaannya (Djojodipuro, 1992).

2.3. Kelembagaan Dalam Agribisnis Kentang

Di Agribisnis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu sistem pertanian yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang paling tinggi baik berbentuk natural maupun uang melalui usaha dibidang pertanian (Anonim,2012).

Keberadaan kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis nasional sangat penting untuk menciptakan agribisnis Indonesia yang tangguh dan kompetitif. Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam

mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Beberapa lembaga pendukung pengembangan agribisnis adalah:

1. Pemerintah, Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah, memiliki wewenang, regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil.
2. Lembaga pembiayaan, Lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan modal investasi dan modal kerja, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Penataan lembaga ini segera dilakukan, terutama dalam membuka akses yang seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis kecil dan menengah yang tidak memiliki aset yang cukup untuk digunakan guna memperoleh pembiayaan usaha.
3. Lembaga pemasaran dan distribusi, Peranan lembaga ini sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan agribisnis, karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara deficit unit (konsumen pengguna yang membutuhkan produk) dan surplus unit (produsen yang menghasilkan produk).
4. Koperasi, Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input-input dan hasil pertanian. Namun di Indonesia perkembangan KUD terhambat karena KUD dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan pemerintah, modal terbatas, pengurus dan pegawai KUD kurang profesional.
5. Lembaga pendidikan formal dan informal, Tertinggalnya Indonesia dibandingkan dengan negara lain, misalnya Malaysia, lembaga ini

sangat berperan sangat besar dalam pengembangan agribisnis dampaknya Malaysia sebagai raja komoditas sawit. Demikian juga Universitas Kasetsart di Thailand telah berhasil melahirkan tenaga-tenaga terdidik di bidang agribisnis, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya agribisnis buah-buahan dan hortikultura yang sangat pesat. Oleh karena itu, ke depan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator bukan sebagai pengatur dan penentu mekanisme sistem pendidikan. Dengan demikian diharapkan lembaga pendidikan tinggi akan mampu menata diri dan memiliki ruang gerak yang luas tanpa terbelenggu oleh aturan main yang berbelit-belit.

6. Lembaga penyuluhan, Keberhasilan Indonesia berswasembada beras selama kurun waktu 10 tahun (1983-1992) merupakan hasil dari kerja keras lembaga ini yang konsisten memperkenalkan berbagai program, seperti Bimas, Inmas, Insus, dan Supra Insus. Peranan lembaga ini akhir-akhir ini menurun sehingga perlu penataan dan upaya pemberdayaan kembali dengan deskripsi yang terbaik. P peranannya bukan lagi sebagai penyuluh penuh, melainkan lebih kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat.
7. Lembaga Riset Agribisnis, Lembaga ini jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain yang dahulunya berkiblat ke Indonesia. Semua lembaga riset yang terkait dengan agribisnis harus diperdayakan dan menjadikan ujung tombak untuk menghasilkan komoditas yang unggul dan daya saing tinggi. Misalnya Meksiko dapat

memproduksi buah avokad yang warna daging buahnya kuning kehijau-hijauan, kulit buah bersih dan halus, dan bentuk buah yang besar dengan biji yang kecil.

8. Lembaga penjamin dan penanggung resiko, Resiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir semuanya dapat diatasi dengan teknologi dan manajemen yang handal. Instrumen heading dalam bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjaminan berbagai resiko dalam agribisnis dan industri pengolahannya.

Proses yang melibatkan kelembagaan, baik dalam bentuk lembaga organisasi maupun kelembagaan norma dan tata pengaturan, pada umumnya masih terpusat pada proses pengumpulan dan pemasaran dalam skala tertentu. Bagi sebagian besar wilayah eksistensi kelembagaan pertanian dan petani belum terlihat perannya. Padahal fungsi kelembagaan pertanian sangat beragam, antara lain adalah:

- sebagai penggerak
- penghimpun
- penyalur sarana produksi
- pembangkit minat dan sikap

Elemen kelembagaan yang berperan adalah kelembagaan dalam bentuk lembaga organisasi dan kelembagaan norma. Salah satu penampilan (manifestasi) kelembagaan pertanian lokal yang mampu menjangkau petani kecil di wilayah pedesaan Indonesia adalah lembaga

penyalur sarana produksi informal dalam bentuk penjaja kredit keliling. Lembaga ini merupakan lembaga non-organisasi dan dioperasikan oleh individu-individu yang mampu menjalin kepercayaan pengambil kredit dengan berbagi norma dan perilaku yang diterima secara sosial. Kondisi saling mempercayai ini merupakan jaminan akan kelancaran penyaluran kredit, pembayaran kembali, penjualan hasil pertanian dan proses alih informasi dan teknologi.

Elemen kelembagaan sebagai salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan keterampilan dan perbaikan kemampuan produksi petani sering terlupakan karena peran nyatanya dalam proses produksi sering berada dalam posisi marginal. Sejauh ini upaya peningkatan produksi pertanian senantiasa dikaitkan dengan penerapan dan jenis teknologi yang dinilai sesuai dengan tujuan produksi, padahal peran kelembagaan dan lembaga pertanian dalam proses penyebaran dan adopsi-inovasi teknologi pertanian masih sangat kuat. Lebih jauh lagi pada hierarki sosial tertentu, proses penyaluran informasi dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan peran kelembagaan dan situasi sosial tertentu. Dengan demikian upaya penelitian dan pengamatan elemen kelembagaan dan perannya dalam proses pengembangan dan perkembangan produksi pertanian diharapkan mampu meningkatkan input untuk penyusunan program dan kebijakan regional dan nasional.

2.4. Pengembangan Kelembagaan Dalam Agribisnis Kentang

Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mawadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003).

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah:

1. Prinsip otonomi (spesifik lokal). Pengertian prinsip otonomi disini dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu :
 - a. Otonomi individu.

Pada tingkat rendah, makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta (Basri, 2005).

Kebebasan inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga mereka dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul (Syahyuti, 2007).

b. Otonomi desa (spesifik lokal)

Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri (spesifik lokal). Pedesaan di Indonesia, disamping bervariasi dalam kemajemukan sistem, nilai, dan budaya; juga memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang dan beragam pula. Kelembagaan, termasuk organisasi, dan perangkat-perangkat aturan dan hukum memerlukan penyesuaian sehingga peluang bagi setiap warga masyarakat untuk bertindak sebagai subjek dalam pembangunan yang berintikan gerakan dapat tumbuh di semua bidang kehidupannya. Disamping itu, harus juga memperhatikann elemen-elemen tatanan. Yang hidup di desa, baik yang berupa elemen lunak (soft element) seperti manusia dengan sistem nilai, kelembagaan, dan teknostrukturnya, maupun yang berupa elemen keras (hard element) seperti lingkungan alam dan sumberdayanya, merupakan identitas dinamis yang senantiasa menyesuaikan diri atau tumbuh dan berkembang (Syahyuti, 2007).

2. Prinsip pemberdayaan.

Pemberdayaan mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian (Payne, 1997).

Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri (Taylor dan Mckenzie, 1992).

Pada proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana, dkk, 2003) yaitu :

- a. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.
- b. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Kebijakan ini diterjemahkan misalnya di bidang ekonomi berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar, sedangkan di bidang sosial politik berupa tersedianya berbagai pilihan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan, meliputi :

- a. Pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan.
- b. Perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial (pendidikan, gizi, kesehatan, dan lain-lain).

- c. Program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelola kebutuhan pedesaan.

Untuk keberhasilannya diperlukan kerjasama antara : administrasi lokal, pemerintah lokal, kelembagaan/organisasi yang beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan dan bisnis swasta (tiga pilar kelembagaan) yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional dan global (Uphoff, 1992).

Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilar kelembagaan (Elizabeth, 2007a):

- a. Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas (voluntary sector).
- b. Kelembagaan pasar (private sector) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka.
- c. Kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector).

Ketiga pilar yang menopang kehidupan dan kelembagaan masyarakat di pedesaan tersebut perlu mereformasikan diri dan bersinergis agar sesuai dengan kebutuhan yang selalu mengalami perkembangan. Inilah yang dimaksud dengan tranformasi kelembagaan sebagai upaya pemberdayaannya, yang dilakukan tidak hanya secara internal, namun juga tata hubungan dari keseluruhan kelembagaan tersebut.

Disisi lain, pemberdayaan kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan agar berorientasi pada: a). Pengusahaan komoditas (pangan/non pangan) yang paling menguntungkan, b). Skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya, c). Win-win mutualy dengan kemitraan yang kolehial, d). Tercipta interdependensi hulu-hilir, e). Modal berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani), f). Koperatif, kompetitif dan transparan melalui sistem informasi bisnis, g). Memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta h). Dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif (inovatif) (Elizabeth, 2007b).

Beberapa kunci dalam pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan adalah : adanya akses kepada informasi, sikap inklusif dan partisipasi, akuntabilitas, dan pengembangan organisasi lokal (Saptana, dkk, 2003).

3. Prinsip kemandirian lokal.

Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi. Upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, dimana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman (diversity) yang dikandungnya (Amien, 2005).

Kegagalan pengembangan kelembagaan petani selama ini salah satunya akibat mengabaikan kelembagaan lokal yang hidup di pedesaan, karena dianggap tidak memiliki jiwa ekonomi yang memadai. Ciri kelembagaan pada masyarakat tradisional adalah dimana aktivitas ekonomi melekat pada kelembagaan kekerabatan dan komunitas. Pemenuhan ekonomi merupakan tanggungjawab kelompok-kelompok komunal genealogis. Ciri utama kelembagaan tradisional adalah sedikit kelembagaan, namun banyak fungsi. Beda halnya dengan pada masyarakat modern yang dicirikan oleh munculnya banyak kelembagaan dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan sempit-sempit (Saptana, dkk, 2003).

Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian upaya mekanistik yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).

2.5. Kerangka Pikir

Agribisnis sering diartikan sempit, yaitu perdagangan atau pemasaran hasil pertanian. Padahal konsep agribisnis adalah utuh, mulai dari proses produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Agribisnis dapat berkembang di Indonesia karena kondisi daerah yang menguntungkan, antara lain: lokasinya di garis khatulistiwa, berada diluar zona angin taifun, tersedianya sarana dan prasarana pendukung berkembangnya agribisnis, dan kemauan politik pemerintah untuk memberikan prioritas. Hambatan dalam pengembangan agribisnis di Indonesia terletak pada berbagai aspek, antara lain: Pola produksi terletak di lokasi yang berpencar, sarana dan prasarana belum memadai di luar Jawa, biaya transportasi menjadi lebih tinggi, adanya pemusatan agroindustri di kota-kota besar, dan sistem kelembagaan kurang mendukung berkembangnya kegiatan agribisnis. Dengan adanya persaingan yang ketat terhadap pemasaran hasil pertanian di pasaran dunia, menuntut peranan kualitas produk, dan kemampuan menerobos pasar dunia.

Kabupaten Gowa, memiliki potensi untuk pengembangan agribisnis tanaman kentang yang cukup prospektif, karena didukung oleh sumberdaya yang tersedia meliputi : (1) Sumber daya Alam, (2) Sumber daya Manusia, (3) Infrastruktur, (4) Kelembagaan. Sumber daya yang tersedia tersebut apabila dikelola secara optimal, efektif dan efisien serta diberdayakan akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Permasalahan mendasar yang dihadapi dan diperlukan untuk dipecahkan adalah merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aspek produksi dan sumber daya yang nampak tersedia seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis kentang di Kabupaten Gowa.

Strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan sekaligus sebagai faktor yang dapat mendukung keberhasilan pengembangan agribisnis kentang adalah : (1) Pengelolaan secara optimal, efektif, efisien sumber daya alam yang tersedia yaitu luas lahan, jenis tanah, iklim, produksi, dan produktivitas, (2) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengalaman petani, penerapan teknologi, dan permodalan, (3) Pengembangan dan pemanfaatan secara baik infrastruktur yang tersedia yaitu jalan usahatani, pasar hasil usahatani, unit pengelolaan hasil, kebun benih, (4) Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani,

koperasi tani, lembaga penyuluhan, lembaga keuangan, lembaga pemasaran, LSM.

